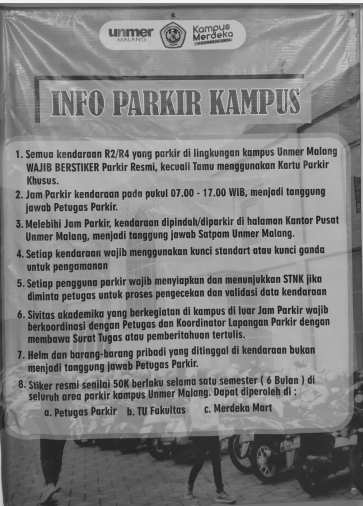


Warta Basement



UNIVERSITAS MERDEKA SILENT FACILITY

Fasilitas Kampus yang Diam Tak Bersuara



UNIT KEGIATAN PERS MAHASISWA CIVITAS
Basement III Keuangan dan Perbankan
Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No.57
Telp : 0895397691329
EMAIL : unmercivitas@gmail.com

EDISI
APRIL
2026

PENGANTAR REDAKSI

SALAM PERS MAHASISWA!

Kebijakan parkir berbayar di Universitas Merdeka Malang hadir sebagai upaya pembenahan sistem dan peningkatan layanan. Namun di balik perubahan yang cepat terasa ini, terdapat persoalan lain yang luput dari perhatian seperti minimnya sosialisasi fasilitas penting seperti poliklinik kampus yang telah lama tersedia.

Melalui edisi ini, kami mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh bagaimana prioritas dan transparansi pengelolaan fasilitas kampus dijalankan. Sebab, pelayanan yang baik tidak hanya soal kebijakan yang diterapkan, tetapi juga tentang informasi yang merata dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.

Selamat membaca.

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Rektor Universitas Merdeka Malang. **Penanggung Jawab** : Pimpinan Umum UKPM. **Pembina** : H. Rochmad Effendi B.H.Sc.M.si. **Pemimpin Umum** : Kevin Khayla Octova.
Pemimpin Redaksi : Fian Wahyu Firmansyah.
Redaksi Pelaksana : Ahman Ibadurrohman.
Editor : Najma Awalia Rizkia F, Nova Velinda Fitri.
Sirkulasi : Redaksi WB.
Layout : Muhamad Argi Ferdiansyah, Mochamad Naufal Dava Raffialy.
Redaksi : Rayhan Arsyadillah, Caecilia Pelita Andini, Nabila Putri Larasati, Nanda Ainun Najwa, Najma Awalia Rizkia F, Novia Rahmawati, Ahmad Mulya Saputra, Khotimatul Maulidah, Muhammad Daffa Nugraha..

2

Pengantar
& Redaksi

3

Daftar Isi

4

Artikel Utama

6

Fokus

9

Ilustrasi

10

Fokus

UNIVERSITAS MERDEKA SILENT FACILITY

MALANG — Universitas Merdeka Malang mulai menerapkan kebijakan parkir berbayar melalui stiker yang dihargai senilai Rp50 ribu per semester sejak 30 Maret 2026. Sebagai bagian dari reformasi sistem parkir kampus yang selama ini dinilai rawan kebocoran dana dan keluhan mahasiswa. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa, baik reguler pagi maupun kelas sore dengan sistem pembayaran di muka yang direalisasikan melalui stiker parkir. Saat keluar area kampus, mahasiswa diwajibkan menunjukkan STNK sebagai prosedur keamanan.

Namun, masa transisi masih menyisakan persoalan. Warih Widodo, mahasiswa kelas sore semester enam Fakultas Hukum, mengaku hingga kini masih membayar parkir secara tunai. “Kalau di kelas sore, kebijakan parkir baru kan untuk reguler pagi. Kalau kelas sore masih tetap membayar parkir seperti itu,” ujarnya dalam wawancara. Warih juga belum memiliki stiker parkir karena merasa informasi yang didapatnya masih kurang lengkap.

Ketua Koperasi Karyawan UNMER, Pak Aam Fajar, menegaskan bahwa kebijakan baru berlaku untuk semua mahasiswa tanpa kecuali. Mengetahui adanya laporan pungutan tunai di Fakultas Hukum pada jam kelas sore, ia menyatakan hal itu tidak benar. “Itu enggak bener. Praktik di lapangan memang tidak semudah yang kita inginkan. Ini masih masa transisi,” katanya. Pak Fajar mengakui masih ditemukan kasus mahasiswa memberi uang tunai kepada petugas dengan alasan belum membeli stiker.

Perubahan sistem dilakukan untuk menutup potensi kebocoran pada sistem lama yang menggunakan pembayaran harian Rp1.000–Rp2.000. “Potensi penerimaan parkir itu banyak kebocoran di sistem lama. Yang rugi lembaga sama mahasiswa,” kata Bapak Fajar

Praktik lama dinilai memungkinkan mahasiswa membayar lebih dari tarif resmi dan dana tidak seluruhnya masuk ke lembaga karena sistem setoran tidak profesional. Di sisi lain, juru parkir Fakultas Hukum, Muhammad Soleh, menyebut kebijakan baru mempermudah tugasnya. “Lebih gampang, soalnya kita enggak perlu ambil uang, Cuma tinggal menunjukkan STNK saja,” ujarnya. Namun, ia juga mengakui perubahan sistem berpengaruh pada pola gaji yang semula harian menjadi bulanan.

Menjawab pertanyaan mendasar mengapa mahasiswa harus membayar parkir, Aam Fajar menjelaskan, “Pertama, kita ini lembaga swasta. Segala sesuatu kembali ke biaya. Bayar parkir itu untuk membayar pelayanan parkir sebenarnya. Petugas parkir dibayar setiap bulan, beda dengan dulu yang mungut sendiri lalu setor tidak jelas.” Ia menambahkan bahwa dana parkir akan dikelola untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan kampus.

Tidak hanya masalah parkir yang selama ini luput dari perhatian mahasiswa. Di tengah kesibukan kampus merapikan sistem parkir dan mengejar pemasukan, terdapat fasilitas lain yang hampir tidak pernah terdengar yakni poliklinik kampus. Padahal, tempat ini sudah beroperasi sejak lama. Poliklinik Universitas Merdeka Malang bukan fasilitas baru. Berdasarkan wawancara dengan dr. Supriyono, selaku dokter penanggung jawab poliklinik, layanan kesehatan ini sudah berdiri sejak 4 Januari 1984. Tujuannya jelas untuk melayani seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Sangat disayangkan, banyak sekali mahasiswa tidak mengetahui tentang keberadaan poliklinik.

“Dari survei yang kalian lakukan, kayaknya memang benar. Harusnya dari awal, pas ospek misalnya, disampaikan kalau kampus

punya poliklinik,” ujar dr. Supriyono.

Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya kesadaran mahasiswa. Dalam survei internal tim UKPM Civitas per 3 April 2026, sekitar 90 persen mahasiswa mengaku tidak mengetahui ada poliklinik kampus. Padahal layanan yang diberikan cukup penting dan mendasar. Poliklinik ini gratis untuk civitas akademika Universitas Merdeka Malang mulai dari pengobatan rawat jalan sampai pemberian obat. Hanya terbatas untuk pemeriksaan tertentu, seperti cek gula darah atau kolesterol, ada biaya tambahan. Alasannya karena keterbatasan alat dan anggaran yang ditanggung kampus. Tentang jam operasional, poliklinik buka setiap hari pukul 08.00 hingga 13.00. Namun, dokter hanya melakukan praktik pada hari Senin dan Rabu. Di luar waktu tersebut, layanan tatap muka tidak tersedia pasien hanya dapat berkonsultasi darurat melalui tenaga medis yang berjaga.

Semua ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya prioritas pengelolaan fasilitas kampus itu apa? Kalau alasan utama parkir berbayar adalah buat perbaikan layanan, maka transparansi penggunaan dana dan pemerataan informasi fasilitas menjadi hal yang nggak bisa ditawar lagi.

Penulis: Fian Wahyu F.

Reformasi Parkir Universitas Merdeka Malang: Tutup Kebocoran atau Beban Baru bagi Mahasiswa?



MALANG — Sejak 30 Maret 2026, Universitas Merdeka Malang memberlakukan sistem parkir berbayar berupa stiker senilai Rp50.000 per semester bagi seluruh mahasiswa, baik reguler pagi maupun kelas sore. Kebijakan ini menggantikan sistem lama yang memungut Rp1.000–Rp2.000 per keluar-masuk kampus. Tujuannya jelas untuk menutup potensi kebocoran dana, memprofesionalkan petugas parkir, dan meningkatkan pelayanan serta keamanan. Namun di masa transisi, praktik di lapangan masih menimbulkan keluhan, terutama soal sosialisasi dan beban finansial mahasiswa.

Tim redaksi Media Civitas melakukan investigasi mendalam dengan mewawancarai mahasiswa dari berbagai fakultas, juru parkir, hingga Ketua Koperasi Karyawan UNMER, yakni bapak Aam Fajar. Hasilnya menunjukkan gambaran berimbang dengan keuntungan sistem baru, tapi juga kritik tajam dari mahasiswa serta tantangan implementasi di lapangan.

Potensi Kebocoran Dana Yang Besar

Menurut Pak Aam Fajar, sistem lama yang berjalan puluhan tahun sejak UNMER berdiri tahun 1964 memiliki banyak celah. Petugas

parkir bukan karyawan tetap UNMER, melainkan tenaga lepas di bawah pengelolaan koperasi tanpa kontrak formal. Rekrutmen dilakukan secara turun temurun dari embah ke anak, ke cucu, hingga kerabat dekat.

“Potensi penerimaan parkir itu banyak kebocoran di sistem lama,” jelas pak Aam Fajar. “Mahasiswa bayar Rp1.000, tapi di lapangan sering jadi Rp2.000 dan tidak dikembalikan. Yang disetor ke lembaga jauh di bawah potensi sebenarnya. Yang rugi lembaga dan mahasiswa.”

Ia menyebut praktik ini menciptakan “dinasti-dinasti kecil” di setiap fakultas. Seorang petugas bisa membayar Rp75.000–Rp126.000 per hari kepada rekan lain, sementara dana tidak sepenuhnya masuk ke yayasan. “Bayangkan, lahan parkir dikuasai segelintir orang luar yang bukan pegawai UNMER. Kalau disewakan, lembaga bisa dapat banyak,” tambahnya.

Sistem Baru: Stiker Rp50.000, Profesionalisme, dan Tanggung Jawab Lembaga

Kini petugas parkir direkrut secara profesional

dengan kontrak enam bulan, wawancara, dan identitas lengkap. Mahasiswa cukup membeli stiker di muka dan menunjukkan STNK saat keluar. Tidak ada lagi pungutan harian.

Juru parkir Fakultas Hukum, Muhammad Soleh, mengakui perubahan ini mempermudah tugasnya.

Lebih gampang, soalnya kita enggak perlu ambil uang. Cuma tinggal nunjukin STNK saja,” ujar Soleh. Namun ia juga merasakan dampak pada pola gaji baru dari harian menjadi bulanan. “Belum merasakan signifikan, masih belum sebulan penuh,” katanya.



Bapak Aam Fajar menegaskan dana parkir dikelola koperasi untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan. Lembaga juga bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan selama jam operasional parkir. “Ini untuk membayar pelayanan parkir sebenarnya. Petugas parkir dibayar setiap bulan, beda dengan dulu yang mungut sendiri lalu setor tidak jelas,” tegasnya. Ia juga menyebut rencana jangka panjang: modernisasi sistem, lomba desain stiker, dan bahkan pembangunan parkir bertingkat.

Suara Mahasiswa: Antara “Lebih Enak” dan “Memberatkan”

Pendapat mahasiswa terbelah.

Warih Widodo mahasiswa Fakultas Hukum, kelas sore, semester 6 masih membayar tunai karena informasi yang diterimanya belum

lengkap. “Kalau di kelas sore, kebijakan parkir baru kan untuk reguler pagi. Kalau kelas sore masih tetap membayar parkir seperti itu,” katanya. Meski demikian, ia menilai sistem baru lebih simpel dan aman: “Lebih perlu ya. Karena lebih simple juga, lebih enak juga, dan mungkin pengawasan terhadap sistem parkir ini lebih aman.”



Daniel mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, angkatan 2024 merasa kebijakan ini kurang perlu. “Kita udah bayar UKT, masa parkir juga nggak bebas. Kukira awalnya bikin smart gate, ternyata masih pakai tukang parkir cuma mengawasi doang,” ujarnya. Ia keberatan dengan nominal Rp50.000 per semester karena “terlalu memberatkan mahasiswa”. Meski demikian, ia mengakui secara perbandingan lebih enak daripada sistem lama yang bisa double payment saat pulang pergi kampus.

Dua mahasiswa lain yakni Noval dan Marcel lebih tegas menolak. “Nanggung sih... dari awal kita maunya parkir gratis, malah meningkatkan beban mahasiswa,” kata mereka. Mereka menyoroti bahwa Rp50.000 bisa dipakai untuk kebutuhan lain seperti makan seminggu. Harapan mereka sama: “Semoga parkirnya dihilangkan.”

Masa Transisi: Sosialisasi Kurang dan Praktik Lapangan Masih “Bocor”

Meski pak Aam Fajar menegaskan kebijakan berlaku untuk semua mahasiswa tanpa kecuali, di lapangan masih terjadi pungutan

tunai, terutama di kelas sore dan Fakultas Hukum. “Itu nggak bener,” tegas Aam Fajar saat mendengar laporan tersebut. Ia mengakui masa transisi memang sulit dan masih ada toleransi sementara.

Tansparansi penggunaan dana Rp50.000 per semester juga masih dipertanyakan. Daniel selaku mahasiswa beropini “Kurang tau... informasinya juga nggak dikasih tau kemana. Bisa dibilang kurang transparan.”

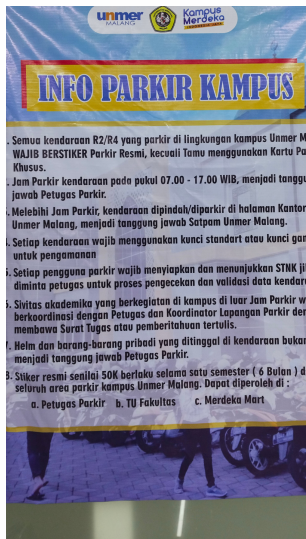
Pertanyaan besar muncul apakah dana parkir benar-benar akan digunakan untuk peningkatan fasilitas secara merata, atau hanya menutup kebocoran tanpa transparansi yang jelas? Pak Aam Fajar membuka pintu diskusi “Kalaupun ada hal-hal yang kurang, ayo kita bicara bersama. Tidak perlu di medsos dulu. Kita diskusi secara akademis.” Ia berencana menyiapkan QR code dan Google Form untuk laporan mahasiswa serta sistem pembayaran QRIS.

Sementara itu, mayoritas mahasiswa yang diwawancarai berharap parkir bisa gratis atau setidaknya nominalnya diturunkan. Beberapa juga menuntut transparansi laporan penggunaan dana dan peningkatan keamanan.

Reformasi parkir UNMER memang diperlukan untuk menutup kebocoran dan memprofesionalkan pengelolaan. Namun di mata sebagian mahasiswa, kebijakan ini terasa sebagai beban tambahan di tengah UKT yang sudah dibayar. Kesuksesan kebijakan baru ini akan sangat ditentukan oleh transparansi, sosialisasi yang lebih baik, dan bukti nyata bahwa dana parkir benar-benar kembali untuk kepentingan civitas akademika Universitas Merdeka Malang.

Tim redaksi Media Civitas akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. Mahasiswa yang memiliki keluhan atau informasi tambahan dapat menyampaikannya langsung ke koperasi atau melalui saluran resmi yang akan disediakan kampus.

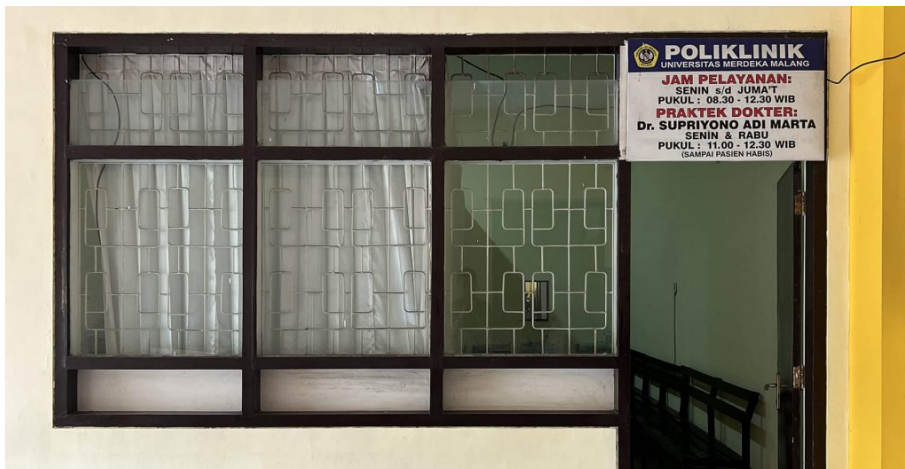
Penulis: Fian Wahyu F.





Ilustrator : Nova

POLIKLINIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG



Malang - Di tengah padatnya aktivitas perkuliahan, keberadaan fasilitas kesehatan di lingkungan kampus seharusnya menjadi hal yang penting dan mudah diakses. Namun tidak banyak mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang mengetahui bahwa kampus ini memiliki poliklinik yang berdiri sejak puluhan tahun lalu.

Poliklinik Universitas Merdeka Malang didirikan pada 4 Januari 1984 oleh dr. Supriyono atas permintaan permintaan Rektor saat itu, dr. Bayu Utomo. Sejak awal, fasilitas ini diperuntukkan bagi civitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga karyawan kampus. "Sejak berdirinya sampai saat itu belum ada poliklinik, jadi saya diminta untuk mendirikan," ungkap dr. Supriyono.



Berbeda dengan klinik pada umumnya, poliklinik ini hanya melayani rawat jalan. Meski demikian, layanan yang tersedia cukup membantu terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan layanan cepat tanpa harus keluar dari lingkungan kampus, "pengobatan dasar serta obat-obatan diberikan secara gratis. Kalau untuk sakit, berobat, dapat obat gratis. Namun, untuk pemeriksaan seperti gula atau kolesterol itu di berbayar dikarenakan alatnya tidak disediakan." ungkap dr. Supriyono.

Sayangnya, keberadaan poliklinik ini belum banyak diketahui mahasiswa. Berdasarkan hasil survei, sekitar 90 persen mahasiswa mengaku tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut. Kondisi ini menjadi ironi, mengingat poliklinik telah lama tersedia di lingkungan kampus.

Menurut dr. Supriyono, kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama. Ia menilai informasi mengenai poliklinik seharusnya disampaikan sejak awal mahasiswa memasuki lingkungan kampus, misalnya melalui kegiatan orientasi. "Harusnya disampaikan saat ospek bahwa

Unmer memiliki poliklinik. Kalau tidak diinfokan, mahasiswa juga tidak tahu,” ungkap dr. Supriyono.

Dari segi operasional, poliklinik buka setiap hari pukul 08.00 hingga 13.00, sementara dokter bertugas pada hari Senin dan Rabu. di luar jadwal tersebut, penanganan tetap dapat dilakukan melalui koordinasi dengan perawat dan dalam kondisi tertentu dokter juga dapat dihubungi untuk konsultasi. Selama lebih dari empat dekade berdiri, poliklinik ini telah beberapa kali berpindah lokasi sebelum menetap disini, meski tidak terlalu besar pelayanan tetap berjalan dengan dukungan tenaga perawat berpengalaman, yang sebagian berasal dari rumah sakit.

Poliklinik tidak hanya menangani keluhan ringan, tetapi juga kasus asma dan infeksi. Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut maka akan dirujuk ke rumah sakit, dibalik pelayanan yang terus berjalan.

Terdapat harapan agar poliklinik dapat berkembang menjadi fasilitas kesehatan yang lengkap, seperti penambahan laboratorium, apotek serta poli gigi. Namun, rencana tersebut masih terkendala persyaratan dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. “Keinginan itu ada, tetapi persyaratannya tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ungkap dr. Supriyono.

Keberadaan poliklinik ini menjadi salah satu bentuk dukungan kampus terhadap kesehatan. Namun, tanpa sosialisasi yang optimal, fasilitas ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maka poliklinik Universitas Merdeka Malang diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga lebih dikenal mahasiswa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai solusi layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Penulis: Novia Rahmawati

SCAN KODE QR INI



**UNTUK KUNJUNGI
WEBSITE KAMI**



<https://lpm-civitas-unmer.infinityfreeapp.com>

@mediacivitas

